

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi meliputi: pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memiliki komitmen yang tinggi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah. Beberapa kebijakan/program pada yang menjadi komitmen urusan ini meliputi: perwujudan jalan provinsi sesuai standar (Lebar Jalan Minimal 7 Meter) sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, dan Penggunaan Aplikasi Jalan Cantik; Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional, Pembangunan Embung, dan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal untuk mendukung (sebagai acuan) pembangunan daerah, yang diwujudkan dengan adanya Perda baru yaitu Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang telah disahkan pada bulan September.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui 10 program, yaitu: Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan; Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan; Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi; Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi; Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku; Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir; Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA; Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang terdistribusi kedalam 64 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya sudah mencapai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. Perincian ketercapaian dari 64 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan PU dan Penataan Ruang L-I.A.1.3.1-9.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan PU dan Penataan Ruang L-I.A.1.3.1-9 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.; 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi memiliki 18 indikator, dengan seluruh indikator tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, 4) Program Perencanaan, dan Pengawasan

Teknis Jalan, Jembatan dan Keciaptakarya yang memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, 5) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi, memiliki 3 indikator dengan seluruh indikator tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, 6) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki 2 indikator dengan seluruh indikator tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, 7) Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku, memiliki 14 indikator, dengan seluruh indikator tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, 8) Program Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir yang memiliki 10 indikator, dengan seluruh indikator tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, 9) Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA yang memiliki 1 indikator, dengan tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, dan 10) Program Penyelenggara-an Penataan Ruang yang memiliki 10 indikator, dengan seluruh indikator tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Secara keseluruhan, dari 64 indikator, semuanya tercapai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

| No | Program | Jumlah Indikator | Tingkat Ketercapaian | | | | |
|----|--|------------------|----------------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
| 1 | Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi | 18 | 18 | - | - | - | - |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 4 | Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciaptakarya | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta | 2 | 2 | - | - | - | - |

| No | Program | Jumlah Indikator | Tingkat Ketercapaian | | | | |
|--------|---|------------------|----------------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
| | Pengembangan Jasa Konstruksi | | | | | | |
| 7 | Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 8 | Program Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 9 | Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Program Penyelenggara-an Penataan Ruang | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Jumlah | | 64 | 64 | - | - | - | - |

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan realisasi pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan, memiliki 2 indikator kinerja program yang seluruhnya telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu: 1) persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor kondisi baik Wilayah Barat, dan 2) persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor kondisi baik Wilayah Timur, dengan realisasi total sebesar 38,41% melebihi target 37,91%.

Penyelenggaraan Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan mempunyai manfaat yaitu meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan yang ada di wilayah Jawa Tengah sehingga aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan kelancaran pergerakan sosial ekonomi dan jasa di Jawa Tengah dapat semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi, memiliki 18 indikator kinerja program yang seluruhnya telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi. Kedelapan belas indikator tersebut apabila dikelompokkan menjadi 2 indikator umum yaitu persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik (dibagi dalam 9 wilayah balai), dengan realisasi total sebesar 90,69% melebihi target 90,20% dan

persentase panjang jembatan dalam kondisi baik (dibagi dalam 9 wilayah balai) dengan realisasi total sebesar 86,73% melebihi target 86,70%.

Penyelenggaraan Program ini memberi manfaat terpeliharanya jalan dan jembatan dengan status kondisi baik serta aman dan nyaman digunakan oleh pengguna jalan, sehingga kelancaran pergerakan sosial dan ekonomi juga dapat terjaga.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, memiliki 2 indikator kinerja program yang telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan dengan realisasi sebesar 93,05% sesuai target serta persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi dengan realisasi 69,99% sesuai target.

Penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan mempunyai manfaat yaitu meningkatnya kecepatan penanganan kerusakan jalan dan jembatan, termasuk di antaranya akibat bencana alam, serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan, sehingga dapat mendukung aksesibilitas dan konektivitas.

Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakarya, memiliki 2 indikator kinerja program yang telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase panjang jalan yang dileger dengan realisasi sebesar 96,30% sesuai target serta persentase database jalan, jembatan, dan keciptakarya yang termutakhirkan sebesar 100% sesuai target.

Penyelenggaraan Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakarya mempunyai manfaat yaitu kualitas pelaksanaan program kebinamargaan dan keciptakarya dapat lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal juga.

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi, memiliki 3 indikator kinerja program yang telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase akses aman air minum perkotaan dengan realisasi sebesar 86,82% melebihi target 86,15%; persentase akses aman air minum perdesaan dengan realisasi sebesar 76,71% melebihi target 76,30%; serta persentase akses sanitasi air limbah domestik dengan realisasi sebesar 89,57% melebihi target 83,50%.

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi mempunyai manfaat yaitu meningkatnya kepedulian masyarakat akan hidup bersih dan sehat, meningkatnya kemudahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta terbangunnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk rasa kepemilikan atas sarana yang terbangun, sehingga tingkat kesehatan yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah bisa lebih meningkat.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi, memiliki 2 indikator kinerja program yang telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar dengan realisasi sebesar 11,17% sesuai target; serta persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi dengan realisasi sebesar 9,71% sesuai target.

Penyelenggaraan Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai manfaat yaitu terpelihara dan terjaganya kualitas bangunan sesuai standar sehingga keamanan dan kenyamanan penggunaannya juga meningkat, dan meningkatnya tenaga kerja terampil yang profesional, mandiri dan berintegritas serta meningkatnya pelayanan yang bertanggung jawab kepada pengguna jasa dan masyarakat pengguna hasil pekerjaan konstruksi sehingga kualitas bangunan/hasil pekerjaan juga lebih terjamin.

Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku, memiliki 14 indikator kinerja program yang seluruhnya telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu: persentase daerah irigasi yang dipelihara (dibagi dalam 6 wilayah balai PSDA), dengan realisasi 100% sesuai target; persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi dengan realisasi sebesar 82,50% sesuai target; prosentase pemenuhan kebutuhan air baku dengan realisasi sebesar 61,80% sesuai target; dan persentase prasarana dan sarana air baku yang dipelihara (dibagi dalam 6 wilayah balai PSDA), dengan realisasi sebesar 100% sesuai target.

Penyelenggaraan Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku mempunyai manfaat yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jaringan irigasi sehingga layanan air irigasi yang dibutuhkan oleh sektor pertanian dapat terpenuhi secara optimal, sehingga dapat mendukung produktifitas hasil pertanian di Jawa Tengah, serta meningkatnya kondisi sarana prasarana air baku sehingga penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Program Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir, memiliki 10 indikator kinerja program yang seluruhnya telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu: persentase darurat banjir yang tertangani (dibagi dalam 6 wilayah Balai PSDA) dengan realisasi 100% sesuai target; persentase luasan daerah bebas genangan banjir dengan realisasi sebesar 17,28% sesuai target; persentase sungai dalam kondisi baik dengan realisasi sebesar 52,20% sesuai target; persentase sungai yang dipelihara (pada wilayah Balai PSDA Bodri Kuto dan Balai PSDA Pemali Comal) dengan realisasi masing-masing sebesar 100% sesuai target.

Penyelenggaraan Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir mempunyai manfaat yaitu terpeliharanya dan meningkatnya fungsi sarana prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai, sehingga berguna

melindungi kawasan strategis, sentra produksi pertanian, dan perumahan/permukiman dari bahaya banjir, serta cepatnya penanganan banjir sehingga dapat meminimalkan korban bencana banjir.

Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA, memiliki 1 indikator kinerja yang telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 21,38% sesuai target.

Penyelenggaraan Program ini mempunyai manfaat dapat meningkatkan implementasi perencanaan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal pada kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, memiliki 10 indikator kinerja program yang telah mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu: persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang dengan realisasi sebesar 72,00% sesuai target; persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gubernur dengan realisasi sebesar 21,42% melebihi target 20,00%; persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan realisasi sebesar 71,50% sesuai target; persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun dengan realisasi sebesar 6,67% sesuai target; dan Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di 6 wilayah Balai PSDA, dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat dari program ini adalah meningkatkan perwujudan tertib ruang dan mengarahkan kegiatan pembangunan sektoral dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan strategis/prioritas, mengurangi kesenjangan wilayah, yang pada akhirnya mampu mendukung kesejahteraan masyarakat melalui terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Sebaran capaian indikator kinerja bidang pekerjaan umum di kabupaten/kota, untuk indikator persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik tersebar pada 31 kabupaten/kota dengan capaian tertinggi di Kabupaten Banyumas (88,84%) dan terendah di Kabupaten Demak (0%); untuk indikator persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik tersebar pada 31 kabupaten/kota dengan capaian tertinggi 99,86% berada di Kota Semarang serta capaian terendah di Kabupaten Jepara (71,58%); untuk indikator persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik tersebar pada 31 kabupaten/kota dengan capaian tertinggi di Kabupaten Pati (98,97%) dan capaian terendah di Kabupaten Cilacap (70,68%); indikator persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar tersebar di 35 kabupaten/kota dengan standar capaian 11,17%; indikator persentase akses aman air minum perkotaan tersebar di 35 kabupaten/kota dengan capaian tertinggi 100% berada di Kabupaten Purbalingga dan Pemalang, dan terendah di Kabupaten Boyolali (34,03%); indikator persentase akses aman air minum

perdesaan tersebar di 29 kabupaten dengan capaian tertinggi di Kabupaten Wonosobo (97,24%) dan capaian terendah di Kabupaten Pati (51,05%); untuk indikator persentase akses sanitasi air limbah domestik tersebar pada 35 kabupaten/kota dengan capain tertinggi 100% berada di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Blora, Rembang, Kendal dan Kota Salatiga serta capaian terendah di Kabupaten Banjarnegara (60,12%).

Adapun realisasi sebaran indikator kinerja di 35 kabupaten/kota sebagaimana lampiran L-I.E.5-6.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp.1.137.747.822.000,00 yang terdistribusi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** (Belanja Pegawai) sejumlah Rp.176.496.641.000,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp.961.251.181.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 10 program dengan realisasi fisik sebesar 98,95% dan keuangan 95,26%.

Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan, alokasi anggaran sejumlah Rp325.010.744.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,59% dan keuangan 94,37%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu: Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1 dengan keluaran Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 sepanjang 10,96 km, Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1 sepanjang 300 m dan Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK) sepanjang 8,8 km; Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2 dengan keluaran Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2 sepanjang 14,37 km dan Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 2 sepanjang 100 m; Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Timur 1 dengan keluaran Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1 sepanjang 20,23 km; Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Timur 2 dengan keluaran Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 2 sepanjang 9,97 km. Total Panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya sepanjang 61,87 Km dari target sepanjang 49,890 Km.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi, alokasi anggaran sejumlah Rp216.935.696.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,76% dan keuangan 97,07%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu: Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi dengan keluaran rehabilitasi jalan 40,49 km, rehabilitasi jembatan 526,40 m, rehabilitasi dinding penahan tanah 8,91 km, rehabilitasi saluran drainase 7,25 km; dan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi dengan keluaran pemeliharaan rutin jalan 2.112,43 km dan pemeliharaan rutin jembatan 20.224,20 m.

Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi tersebar di BPJ Wilayah Semarang, Pati, Purwodadi, Magelang, Wonosobo, Surakarta, Cilacap, Tegal dan Pekalongan dengan keluaran terwujudnya pengembalian kondisi jalan dan

jembatan di wilayah BPJ Semarang sepanjang 4,04 km dan 10,60 m, Pati sepanjang 7,90 km dan 129,50 m, Purwodadi sepanjang 3,60 km dan 20,40 m, Magelang sepanjang 20,00 km dan 22,90 m, Wonosobo sepanjang 3,15 km dan 42,10 m, Surakarta sepanjang 2,50 km dan 172,50 m, Cilacap sepanjang 1,14 km dan 69,5 m, Tegal sepanjang 10,55 km dan 6,00 m serta Pekalongan sepanjang 3,77 Km dan 52,90 m;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi tersebar di BPJ Wilayah Semarang, Pati, Purwodadi, Magelang, Wonosobo, Surakarta, Cilacap, Tegal dan Pekalongan dengan keluaran terpeliharanya secara rutin jalan dan jembatan di wilayah BPJ Semarang sepanjang 214,56 km dan 1.966,20 m , Pati sepanjang 254,25 km dan 2.561,42 m , Purwodadi sepanjang 377,22 km dan 3.519,64 m, Magelang sepanjang 266,23 km dan 2.095,98 m, Wonosobo sepanjang 246,70 km dan 2.268,70 m, Surakarta sepanjang 421,13 km dan 4.368,90 m, Cilacap sepanjang 145,01 km dan 1.963,10 m, Tegal sepanjang 172,68 km dan 2.009,20 m dan Pekalongan sepanjang 241,80 km dan 2.380,65 m.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp18.564.938.000,00, sampai dengan triwulan 4 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 89,87%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat meliputi jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah sebanyak 98 unit dan jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara sebanyak 27 unit; Kegiatan Pengadaan, Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah bronjong sebanyak 4.000 buah; serta Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik yang meliputi Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 sebanyak 2 dokumen, Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu sebanyak 100 orang, Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi sebanyak 750 buah, Jumlah unit Pemeliharaan alat uji sebanyak 77 unit dan Jumlah unit Penambahan alat uji sebanyak 3 unit.

Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp155.805.539.000,00, sampai dengan triwulan 4 realisasi fisik sebesar 97,99% dan keuangan 97,82%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciaptakaryaan yang meliputi Data Kondisi Jalan, Data Kondisi Jembatan, Jumlah perhitungan LHR, dan Panjang Jalan yang dileger sepanjang 40,89 km; Kegiatan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi; Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi yang meliputi Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan dan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah dengan Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan seluas 56.918,4 m² dari target 58.312,58 m², hal ini dikarenakan pembebasan lahan Jembatan K. Serayu (Ruas : Klampok-Purbalingga), setelah dilakukan survey ternyata kebutuhan lahan yang dibebaskan masih berstatus aset

tanah milik Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng sehingga tidak memerlukan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan K. Serayu.

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp19.199.790.000,00, sampai dengan triwulan 4 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,41%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana air minum; Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS dengan jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III di 29 kabupaten/ Kota; Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan dengan jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pengembangan teknis, kelembagaan, administrasi sarana prasarana air Limbah domestik Kab./Kota (IPLT & IPAL skala permukiman) di 8 kabupaten/ Kota.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp10.843.330.000,00, sampai dengan triwulan 4 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,07%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah: Kegiatan Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah meliputi Belanja Hibah Konstruksi, Tahap 1, UKL/UPL, DED, konstruksi dan Pengawasan konstruksi (Gedung Kejati Jawa Tengah), Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik, Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah di 16 Kabupaten/ Kota, Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah, Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung bagi SKPD Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng; Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi 200 orang; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi dengan jumlah penerbitan HSPK sebanyak 3 Dokumen.

Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp112.965.787.000,00, realisasi fisik sebesar 95,51% dan keuangan 90,32%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi dengan keluaran jumlah daerah irigasi beserta sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dibangun sebanyak 27 lokasi; Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku dengan keluaran sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi dengan jumlah 6 unit; Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi dengan keluaran dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja irigasi sejumlah 4 dokumen; Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku dengan hasil dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja air baku sebanyak 2 dokumen; Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA dengan keluaran laporan kerjasama dan pengelolaan asset sebanyak 4 laporan; Kegiatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku yang tersebar di 6 balai PSDA Provinsi Jawa Tengah dengan hasil berupa sarana dan prasarana irigasi dan air baku yang dipelihara sejumlah 153 lokasi.

Program Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp80.729.088.000,00, realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,14%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai dengan keluaran lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi sejumlah 15 lokasi; kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai dengan hasil dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sungai dan pantai sejumlah 2 dokumen; kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan dengan hasil pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat sejumlah 7 bulan, penanganan sarana prasarana SDA akibat banjir di 40 lokasi dan rekomendasi pemanfaatan alat berat sejumlah 21 unit; kegiatan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai dengan hasil lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara pada Balai PSDA Pemali Comal sejumlah 16 lokasi, Balai PSDA Bodri Kuto sejumlah 10 lokasi; Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai dengan hasil lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai dan pantai pada Balai PSDA Seluna sejumlah 9 lokasi, Balai PSDA Bengawan Solo 17 lokasi, Balai PSDA Probolo 7 lokasi, Balai PSDA Serayu Citanduy 14 lokasi; Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA dengan hasil laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA pada Balai PSDA Pemali Comal sejumlah 3 laporan, Balai PSDA Seluna 3 laporan, Balai PSDA Bengawan Solo 3 laporan, Balai PSDA Probolo 3 laporan, Balai PSDA Serayu Citanduy 1 laporan, Balai Bodri Kuto 3 laporan; Kegiatan Penanganan Banjir dengan hasil pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat pada Balai Bodri Kuto sejumlah 2 laporan, Balai PSDA Seluna 2 laporan, Balai PSDA Bengawan Solo 1 laporan, Balai PSDA Probolo 2 laporan, Balai PSDA Serayu Citanduy 2 laporan, Balai PSDA Pemali Comal 2 laporan.

Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp17.381.269.000,00, realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,45%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA dengan hasil dokumen perencanaan teknis sara dan prasarana SDA sejumlah 34 dokumen; Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA dengan hasil laporan publikasi data hidrologi dan system Informasi SDA sejumlah 3 dokumen dan pos hidrologi yang diperbaiki sejumlah 6 buah; Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dengan hasil dokumen pengembangan dan pendayagunaan SDA sejumlah 8 dokumen.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp3.815.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 95,55%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan keluaran perda RTR Provinsi sejumlah

1 dokumen; Kegiatan pembinaan penyusunan/review rencana tata ruang kab/kota dengan hasil RTR Kab/kota yang mendapatkan rekomendasi gubernur sejumlah 15 dokumen; Kegiatan optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan hasil dokumen yang dievaluasi dan disinkronisasi sejumlah 1 dokumen, peserta sosialisasi sejumlah 200 orang dan workshop TKPRD sejumlah 1 kali; Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan hasil jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang sejumlah 1 dokumen, jumlah kawasan yang dilakukan pemantauan sejumlah 5 kegiatan, dan jumlah peserta pembinaan sebanyak 510 orang; Kegiatan pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah dengan keluaran seluruh kabupaten/kota yang dipantau pemanfaatan ruangnya.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.1.3.1-13.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Pekerjaan Umum pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan 1 hal yaitu pengadaan teknologi deteksi longsor, sebagai upaya pencegahan dini jalan longsor, tebing longsor dan jembatan ambles. Hal ini ditindaklanjuti dengan dilakukannya koordinasi dengan instansi terkait (ESDM dan BPBD) mengenai identifikasi alat deteksi longsor (early warning system), utamanya terkait kesesuaian alat-alat dan ketersediaannya di pasaran, serta mengenai titik lokasi penempatan alat dan pengoperasiannya. Hasil survey sementara, alat deteksi longsor yang sudah ada di pasaran antara lain Gama EWS (UGM) dan LIPI WISELAND (LIPI). Pengadaan, pemasangan, dan pengoperasian alat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada TA 2020.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Cukup rentannya jalan provinsi yang sudah dalam kondisi baik terhadap kerusakan jalan akibat beban muatan yang melampaui standar konstruksi jalan provinsi (muatan sumbu tunggal/MST >8 ton);
- 2) Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat longsor di badan jalan dan tebing jalan, serta jembatan ambles yang mengakibatkan terputusnya arus lalu lintas terutama di daerah yang tanahnya rawan longsor/labil;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas sanitasi yang sudah cukup tersedia oleh masyarakat;
- 4) Potensi kerentanan bangunan jalan, jembatan dan gedung terhadap gempa.
- 5) Menurunnya ketersediaan air, daerah kritis air meningkat;
- 6) Pendekatan/paradigma dalam pengelolaan sumber daya air, masih terkotak-kotak antar kewenangan, sehingga kinerja pengelolaan sumber daya air menjadi tidak optimal.

Solusi

- 1) Peningkatan jalan dengan konstruksi yang awet (misal : betonisasi jalan) dan memperhatikan kondisi lingkungan (terpenuhinya sistem drainase, pengamanan terhadap longsor, dan perlengkapan jalan) untukantisipasi angkutan yang melebihi kapasitas (*Over Dimension and Over Load/ ODOL*);

- 2) Pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ruas jalan di daerah rawan banjir dan longsor, dengan penanganan secara cepat dan tepat melalui Kelompok Masyarakat (Mas Bima);
- 3) Dilakukan penguatan kapasitas Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) dalam mengelola prasarana IPAL dan MCK menuju KPP mandiri dan IPAL lestari yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta meningkatkan akses sanitasi dari dasar menjadi aman;
- 4) Perencanaan desain yang telah memperhitungkan keamanan gempa berdasarkan peta gempa 2017 dan perhitungannya;
- 5) Meningkatkan konservasi sumber daya air antara lain melalui konservasi kawasan hutan, dan sumber mata air;
- 6) Pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan one plan one management.